

KEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)

Endah Setiyowati, Imam Hambali, Edi Widiyanto

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM

Jl. Semarang 5 Malang

Email : endahsetiyowati12@gmail.com

Abstract: Empowerment of Forest Village Community in Implementation of Community Forest Resources Management. The study aims to describe the empowerment of forest villagers in the implementation of PHBM. empowerment includes 4 (four) namely: critical awareness, access to information and resources, participation and welfare. The research was conducted with qualitative approach and case study design. The results of the research show that the empowerment of forest villagers in the implementation of PHBM has a difference. Such critical awareness is good enough in certain circles. Then access to information and resources owned is quite limited but evenly among the parties involved. Participation in forest land management is good but decision-making is lacking. Welfare has been obtained from optimally managed forest resources

Abstrak: Keberdayaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Penelitian bertujuan mendeskripsikan keberdayaan masyarakat desa hutan dalam pelaksanaan PHBM. keberdayaan tersebut meliputi 4 (empat) yakni : kesadaran kritis, akses informasi dan sumberdaya, partisipasi dan kesejahteraan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan rancangan studi kasus. Hasil dari penelitian diketahui bahwa keberdayaan masyarakat desa hutan dalam pelaksanaan PHBM memiliki perbedaan. Seperti kesadaran kritis sudah cukup baik pada kalangan tertentu saja. Kemudian akses informasi dan sumberdaya yang dimiliki cukup terbatas namun merata diantara pihak yang terlibat. Partisipasi dalam pengelolaan lahan hutan sudah baik namun dalam pengambilan keputusan masih kurang. Kesejahteraan telah didapatkan dari sumberdaya hutan yang dikelola dengan optimal.

Kata Kunci : keberdayaan, masyarakat desa hutan, PHBM

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan bagian dari pendidikan nasional yang dapat disebut juga sebagai pendidikan non-formal yang bertujuan untuk mengembangkan segenap potensi seluruh warga masyarakat di luar sistem persekolahan. Pendidikan luar sekolah memiliki hubungan erat dengan sebuah proses pembangunan nasional, yang mana pada era ini memiliki prinsip pemberdayaan untuk menjaga keberlanjutannya. Pembangunan dengan upaya pemberdayaan merupakan salah satu bagian dari proses mendidik dan membelajarkan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan dan proses pemberdayaan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena untuk mencapai sebuah wujud masyarakat berdaya. Maka proses yang

perlu dilalui adalah memberdayakan masyarakat.

Sebelum lebih jauh membahas tentang keberdayaan masyarakat sebagai bagian dari proses pemberdayaan berikut merupakan ungkapan Lutfiansyah dan Hufad (2017: 9) “Pemberdayaan adalah sebuah proses, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan agar mereka dapat lebih mandiri dengan cara menumbuhkan potensi yang dimilikinya, serta menggali rasa percaya dirinya agar mereka dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam perubahan dan perkembangan lingkungannya.” Salah satu kelompok dalam masyarakat desa hutan

yang dimaksud adalah masyarakat terabaikan yang hidup di pinggiran hutan dan menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya hutan. Tentu dengan berbagai tantangan yang ada, masyarakat pada karakteristik ini dituntut untuk bekerjasama baik dalam keamanan maupun pelestarian hutan. Penelitian terhadap pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) yang memiliki gambaran upaya mendidik masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam yang ada disekitarnya ditinjau dari perspektif pendidikan luar sekolah. PHBM secara langsung juga menggunakan teori andragogi yang diterapkan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang berada di setiap BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) untuk membantu memudahkan masyarakat agar dapat melakukan proses belajar dalam melakukan pengelolaan hutan.

Berdasarkan pernyataan diharapkan dalam upaya pemberdayaan, masyarakat yang merupakan pelaku utama melalui proses pemberdayaan akan mendapatkan keberdayaan sebagai alat menuju berdaya. keberdayaan masyarakat dalam upaya pemberdayaan menurut Wirhatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 75) “keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif tentu memiliki keberdayaan yang tinggi. “ Pernyataan menjelaskan bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan individu yang ada dalam kelompok masyarakat dengan tujuan untuk membangun keberdayaannya. lebih lanjut indikator keberdayaan masyarakat menurut Mimbar (2015:9) mengatakan bahwa “UNICEF memberikan 5 dimensi sebagai tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) kesejahteraan, 2) akses, 3) kesadaran kritis, 4) partisipasi dan 5) kontrol.” Lima dimensi tersebut

adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi.

Berdasarkan tolok ukur atau indikator yang telah dijabarkan UNICEF tersebut maka akan lebih tepat jika pada landasan teori ini juga dijelaskan parameter keberdayaan yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) parameter yang untuk meneliti keberdayaan masyarakat desa hutan di kawasan RPH Selorejo. 4 (empat) parameter yang digunakan sesuai dengan aspek dan indikator keberdayaan yang dinyatakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) kesadaran kritis, 2) akses informasi dan sumberdaya, 3) partisipasi dan 4) Kesejahteraan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Kehadiran peneliti diketahui oleh informan dalam hal ini pihak desa dan Perum Perhutani. Peneliti mengikuti secara langsung beberapa kegiatan yang dilaksanakan mengenai pelaksanaan PHBM di RPH Selorejo. Peneliti juga melakukan pendekatan dan pengenalan terhadap Perum Perhutani dalam hal ini Mantri, Mandor, dan pihak desa seperti Kepala Desa, Ketua dan Pengurus LMDH, serta Petani Hutan. Lokasi penelitian dilakukan di RPH Selorejo yang beralamat di Desa Selorejo, Kecamatan Dau Malang serta 4 desa pangkuan hutan yakni: Kucur, Petungsewu, Selorejo dan Gadingkulon .

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses untuk menganalisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan model interaktif yang dimulai dari mengumpulkan data, melakukan reduksi, penyajian data dalam bentuk naratif teks, kemudian ditarik kesimpulan. Setelah data sudah disajikan dan disimpulkan kemudian dianalisis kembali dengan model taksonomi dengan

hasil akhir berupa bagan. Selanjutnya cara yang digunakan untuk mengecek keabsahan temuan adalah triangulasi sumber data dan teknik.

HASIL

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini berupa gambaran Keberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PHBM yang meliputi : (1) kesadaran kritis, (2) akses sumberdaya dan informasi, (3) partisipasi dan (4) kesejahteraan. Penelitian yang dilakukan di 4 desa pangkuan hutan RPH Selorejo yakni: Kucur, Petungsewu, Selorejo, dan Gadingkulon memiliki perbedaan gambaran keberdayaan masing-masing.

Pertama, kesadaran kritis dalam pelaksanaan PHBM di Desa Kucur memiliki kesadaran yang cukup baik, seperti kesadaran kritis ketua LMDH dalam upaya pembagian lahan yang sesuai dengan aturan. Kesadaran kritis ketua kelompok pesadap dalam meningkatkan produksi getah di dusun Sumberbendo. Kesadaran kritis dari ketua pesanggem dusun Krajan dalam pelestarian dan keamanan hutan serta kesadaran kritis kepala desa dalam upaya menjalin kerjasama baik dengan pihak Perhutani.

Kesadaran kritis dikalangan petani terbilang rendah karena dalam mengelola lahan hutan petani menganggap dirinya sebagai penumpang lahan. Kemudian Kesadaran kritis juga dimiliki masyarakat petungsewu dalam pelaksanaan PHBM. Seperti kesadaran kritis tentang hak dan kewajiban LMDH dalam pelaksanaan PHBM yang dimiliki oleh ketua lama maupun baru. Kesadaran kritis ketua kelompok dalam pelaksanaan PHBM untuk mengkoordinir para petani hutan. Serta kesadaran kritis yang dimiliki Kepala Desa dalam berperan menghidupkan kembali LMDH dan keberpihakannya dengan petani hutan yang ditunjukkan saat melakukan negosiasi dengan Perhutani terkait bagi hasil. Kesadaran kritis di Desa Petungsewu juga tumbuh pada petani hutan

yang saat berkumpul saling memberikan masukan dan dengan sedikit keberanian untuk bertanya namun mereka lakukan terutama pada forum formal. Kesadaran kritis juga sudah dimiliki oleh Ketua LMDH desa Selorejo dalam membantu masyarakat untuk bertanggungjawab dalam pengelolaan lahan yang dilakukan oleh petani hutan, serta kesadaran kritis akan peluang dan potensi hutan yang dimiliki sehingga mampu menjadikan kawasan DAS sebagai tujuan wisata.

Kesadaran kritis juga dimiliki oleh petani hutan terutama dalam prinsip berbagi yang memiliki sikap saling peduli, tidak merusak dan mencuri pohon. Kemudian kesadaran kritis lain juga dimiliki oleh kepala desa terutama dalam melihat peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan PHBM sehingga dapat mengambil keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Kesadaran kritis juga dimiliki oleh ketua LMDH desa Gadingkulon terutama dalam pengelolaan lahan pertanian hutan, sumber mata air dan pengembangan wisata. Kesadaran kritis juga dimiliki Kepala Desa dalam pelaksanaan PHBM sehingga ada upaya dalam melakukan pengadaan fasilitas untuk membantu LMDH dalam melaksanakan pengembangan wisata. Serta kesadaran kritis petani akan peraturan larangan kegiatan bercocok tanam yang dilakukan di kawasan hutan.

Kedua, akses informasi dan sumberdaya yang ditunjukkan oleh masyarakat desa hutan di RPH Selorejo tersebut juga berbeda. Seperti halnya yang terjadi di desa Kucur, pihak Pemerintah mengalami kesulitan dalam mengakses pelaksanaan PHBM di desanya. Hal tersebut terjadi karena pihak pemerintah desa memang tidak mengakses informasi pelaksanaan PHBM. Tidak dilakukannya akses tersebut terjadi karena persepsi yang menganggap bahwa Perum Perhutani dan LMDH tidak terbuka dan komunikatif terkait pelaksanaan PHBM. Namun pihak lain seperti LMDH telah mampu

mengakses informasi yang ada terkait dengan pelaksanaan PHBM. Sehingga pelaksanaan PHBM di desa Kucur tetap berjalan walaupun tanpa campur tangan berlebihan dari pihak desa. kemudian dalam akses sumberdaya hutan MDH Kucur dapat mengakses hutan untuk dijadikan lahan pertanian dengan melakukan perpanjangan kontrak dengan perhutani. Selanjutny LMDH telah mengakses sumberdaya teknologi untuk produksi ubi talas untuk dijadikan keripik hanya saja tidak dilaksanakan dengan baik oleh MDH.

Keberdayaan LMDH petungsewu dalam mengetahui apa saja yang harus dilakukan pasca pembentukan namun ketika diterapkan dianggap lancang oleh RPH Selorejo pada saat itu. Namun saat ini seiring aktifnya LMDH Kembali dan keterbukaan Perhutani dalam melaksanakan PHBM masyarakat sudah dapat mengakses informasi dengan baik terutama pada forum yang dibuat oleh pengurus LMDH. Sedangkan dalam upaya akses sumberdaya telah dimiliki oleh MDH di Desa Petungsewu terutama kelompok tani juga sudah dapat mengakses lahan pertanian di hutan.

Berbeda dengan akses informasi yang dilakukan LMDH Desa Selorejo ke pihak Pemerintah desa yang mengalami kendala komunikasi sehingga tidak menghasilkan keputusan atau arahan yang baik utamanya dalam pengembangan wisata. Hal tersebut kemudian menjadikan konflik antar pihak yang terlibat sehingga terjadi pemberhentian sepihak untuk jabatan ketua LMDH. Diketahui pemberhentian tersebut juga dikarenakan rendahnya upaya pemerintah desa dalam mendapatkan akses informasi dalam pembagian hasil dari Wisata Bedengan. Upaya dalam mengakses sumberdaya hutan oleh LMDH Selorejo juga telah didapatkan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan dapat dikelolanya lahan hutan untuk digunakan bercocok tanam dengan kontribusi menjaga keamanan dan kelestarian hutan.

Upaya akses informasi yang dilakukan dalam pelaksanaan PHBM di gadingkulon sudah cukup baik. Dari pihak Perhutani, LMDH dan Pemerintah Desa sudah bersinergi dalam pelaksanaan PHBM. Terutama upaya dalam mengakses informasi yang dilakukan oleh LMDH tentang pelaksanaan PHBM biasanya didapatkan pada forum rutin yang dibuat oleh LMDH Desa Gadingkulon. Upaya yang dilakukan memang efektif karena selain menjadi kegiatan bertukar informasi juga sebagai forum pengambilan keputusan bersama. upaya akses sumberdaya yang dimiliki oleh LMDH Desa Gadingkulon yang telah mampu mengakses sumberdaya hutan yang ada. Hal tersebut ditunjukkan dengan kegiatan pengelolaan lahan hutan, walau saat ini sudah ada pembatas pengelolaan lahan hutan dari Perhutani untuk tidak dikelola secara berlebihan.

Ketiga, Partisipasi sebagai indikator keberdayaan secara umum ditunjukkan oleh masyarakat desa hutan di kawasan RPH Selorejo dengan baik. Seperti halnya yang dilakukan di Desa Kucur dalam pemadaman api ketika kebakaran, hanya saja intensitas berkumpul untuk berdiskusi dan mengambil keputusan atau kesepakatan tidak sering dilakukan. Begitu juga dengan partisipasi yang ada di Desa Petungsewu yang memang belum memiliki agenda berkumpul untuk membahas kegiatan pengelolaan hutan secara intens dan petani hutan fokus pada pertanian yang dilakukan saat ini karena itu dianggap lebih menguntungkan daripada berkumpul dan berdiskusi karena mereka bekerja seharian penuh sehingga malam hari untuk istirahat. Begitu juga yang ada di desa Selorejo yang juga tidak memiliki kegiatan pertemuan sehingga memungkinkan MDH terlibat dan berpartisipasi. Partisipasi dan pelibatan MDH di desa ini terbatas, seperti untuk pengelolaan wisata hanya dikelola oleh LMDH saja. Namun ketika ada kebakaran atau kerjabakti mereka selalu turut serta. Partisipasi yang dinilai cukup tinggi terjadi di Desa Gadingkulon yang memiliki

kegiatan rutin dan intens sehingga mereka sering malakukan pengambilan keputusan dan kespakatan disetiap arisan yang mereka lakukan 15 hari sekali.

Keempat, Dalam pelaksanaan PHBM di kawasan RPH Selorejo di empat desa pangkuan hutan sudah mendapatkan kesejahteraannya dengan bail, untuk mendapatkan kesejahteraan materiil MDH dapat bekerjasama dengan bercocok tanam pada lahan hutan. Kemudian dapat menyadap getah untuk dijual ke Perum Perhutani, kemudian dapat juga mengambil hasil hutan bukan kayu untuk dijual atau dikonsumsi secara pribadi seperti jahe dan kunyit yang dilakukan di Kucur, rumput gajah untuk ternak di hampir seluruh desa dan penanaman tanaman makanan pokok seperti jagung dan ubi. Dari sumberdaya hutan inilah masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dengan maksimal, sehingga kebutuhan materiilnya akan dapat terpenuhi begitu juga spiritualnya.

PEMBAHASAN

Kesadaran kritis dalam menjadi subjek penggerak menurut Isjoni (2006: 130) “Kesadaran kritis merupakan kemampuan berfikir alternatif atau berfikir lateral, sebagai bentuk paling aktual manusia modern. Suatu pikiran yang tidak sekedar mekanis stimuli - respon yang di lapangan tampak dalam sikap yang kaku dan keras karena pilihan dalam pemikiran yang dualistis. Kekayaan pengalaman akan menumbuhkan suatu kesadaran kritis terhadap realitas sosial di mana seseorang terlibat.” Dapat dilihat dari pernyataan tersebut bahwa kesadaran kritis akan tumbuh apabila seseorang memiliki kekayaan pengalaman dan pengetahuan ini tidak lepas dari pengalaman mengakses baik informasi maupun sumberdaya. Sehingga dalam pelaksanaan PHBM masyarakat dapat lebih kritis terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai. Seperti pembagian lahan, harga getah yang ditawarkan, kemudian hak dan kewajiban masyarakat desa hutan dan perhutani yang harus saling dipenuhi. Karena upaya

PHBM dengan prinsip kerjasama sangatlah tidak adil apabila pemenuhan kewajiban tersebut hanya sepihak. Karena kerjasama dianggap berhasil apabila ada ketersalingan baik dari MDH, LMDH maupun Perum Perhutani. Dampak ketidakberhasilan PHBM karena kurangnya kesadaran kritis antar pihak ini terjadi di hampir seluruh desa yang ada di kawasan RPH Selorejo.

Akses Informasi dalam proses pemberdayaan memiliki peran sangat penting. Sehingga akses informasi dalam pemberdayaan masyarakat harus dapat menjadi mudah diperoleh oleh masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soetomo (2012 : 210) yang menyatakan bahwa “pengetahuan dibutuhkan selain agar masyarakat dapat memahami dan menyadari sumberdaya yang tersedia di sekitarnya, juga dibutuhkan untuk mengetahui cara-cara memanfaatkannya.” Sehingga dalam pelaksanaan PHBM adapun informasi yang dapat diakses dalam mengetahui hak dan kewajiban LMDH dalam pengelolaan hutan, batasan dan peraturan dalam pengelolaan hutan, dan tentang harga yang berlaku dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. karena prinsip PHBM merupakan prinsip berbagi sehingga diharapkan masyarakat dan Perum Perhutani dapat saling berbagi hasil, peran dan tanggungjawab untuk menjaga dan melestarikan hutan bersama terlepas dari kepentingan MDH sebagai pemanfaat lahan hutan ataupun Perum Perhutani yang juga memiliki tujuan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.

Tingkat partisipasi menjadi salah satu indikator penting dalam sebuah proses pemberdayaan masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Najiyati dkk (2005: 116) terkait dengan “partisipasi yang merupakan proses aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan yang dibimbing oleh cara berpikir masyarakat sendiri, sehingga mereka dapat melakukan kontrol efektif.” Diketahui dari penjelasan tersebut bahwa partisipasi merupakan sebuah proses aktif dalam kegiatan

maupun program pemberdayaan, yang melibatkan masyarakat berperan dalam mengambil keputusan secara mandiri yang berasal dari pemikiran masyarakat sendiri sehingga mereka dapat melakukan kontrol yang efektif dari keputusan yang diambil. Pada pelaksanaan PHBM masyarakat dianggap memiliki partisipasi tinggi apabila mereka dapat berpartisipasi dalam beberapa kegiatan seperti : kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas, hadir saat pembagian lahan, berpendapat saat agenda pertemuan rutin maupun kondisional, gotong royong dalam melakukan pengamanan hutan, kerja bakti pembersihan pasca tebang, kerja bakti pembuatan jalan kendaraan pengangkut kayu dan kerja bakti pembersihan kawasan sumber dan wisata.

Sebagai masyarakat berdaya sesuai dengan pernyataan UNICEF bahwa masyarakat berdaya harus memiliki tingkat kesejahteraan dasar sebelum lebih jauh Maeswara (2009: 246) mengatakan bahwa “Kesejahteraan adalah rasa tenteram rakyat karena terpenuhinya hajat hidup lahi batin. Kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal menyangkut kesehatan, sandang, pangan dan papan (kesejahteraan ekonomi dan sosial), sedangkan kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional maupun spiritual rakyat.” Tingkat kesejahteraan masyarakat, yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan pendapatan dan kesehatan. Selain itu masyarakat dianggap sebagai masyarakat yang sejahtera apabila kebutuhan spiritual dan materiilnya tercukupi dengan seimbang dan selaras. Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan kaitannya dengan kesejahteraan. PHBM memiliki andil dan peran dalam memberikan kesejahteraan terhadap Masyarakat Desa Hutan (MDH). PHBM sebagai sebuah sistim pengelolaan hutan dengan prinsip berbagi sumberdaya dan hasil, disini Perum Perhutani yang

bekerjasama dengan masyarakat melalui LMDH telah membuka kerjasama yang diharapkan saling menguntungkan nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Kesadaran kritis sebagai salah satu indikator dari keberdayaan suatu komunitas atau masyarakat di kawasan RPH Selorejo dalam pelaksanaan PHBM di Desa Kukur, Petungsewu, Selorejo dan Gadingkulon memiliki kesadaran kritis yang cukup baik pada kalangan tertentu. Kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh beberapa pihak saja seperti Kepala Desa, Ketua LMDH, Ketua Kelompok petani hutan atau yang juga disebut kalangan elit yang terlibat. Sedangkan petani hutan dan masyarakat biasa lainnya masih memiliki kesadaran kritis yang rendah karena mereka menganggap bahwa hutan yang mereka manfaatkan sumberdayanya untuk meladang dan menggantungkan ekonominya bukan milik pribadi.

Keberdayaan masyarakat pada akses informasi dan sumberdaya, pelaksanaan PHBM di kawasan RPH Selorejo terbilang baik. Hal tersebut terjadi karena MDH yang terdiri dari beberapa kalangan memiliki perbedaan kemampuan mengakses sumberdaya maupun informasi yang ada seperti kewenangan, peraturan dan sistem PHBM yang dilaksanakan antara Perhutani dengan MDH (Masyarakat Desa Hutan).

Perbedaan kemampuan akses antar kelompok elit masyarakat dengan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan masih ada. Kemudian pada partisipasi sebagai indikator keberdayaan secara umum ditunjukkan oleh masyarakat desa hutan di kawasan RPH Selorejo dengan baik. Seperti halnya partisipasi yang dilakukan dalam pemadaman api ketika terjadi kebakaran, pembuatan akses jalan untuk transportasi pengangkutan kayu pasca tebang, dengan bergotongroyong antar petani hutan, dalam peningkatan

produksi getah Perhutani sampai kerjabakti dalam pengembangan wisata di kawasan hutan. Hanya saja memang intensitas berkumpul untuk kemudian berdiskusi dan mengambil keputusan atau kesepakatan tidak sering dilakukan. Sedangkan yang terakhir. Dalam pelaksanaan PHBM di kawasan RPH Selorejo, hampir seluruh pihak yang terlibat mendapatkan kesejahteraan materiil. Kesejahteraan tersebut diperoleh MDH dari bekerjasama dengan bercocok tanam pada lahan hutan. Sehingga dari sumberdaya hutan inilah masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dengan maksimal, sehingga kebutuhan materiilnya akan dapat terpenuhi begitu juga spiritualnya.

SARAN

Saran yang diberikan kepada LMDH dari penelitian ini diharapkan untuk lebih kritis dalam menerima dan menyampaikan aspirasi dalam melaksanakan PHBM di desa pangkuan masing-masing. Untuk Perum Perhutani diharapkan informasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam memperbaiki pelaksanaan PHBM dan meningkatkan keberdayaan masyarakat. Bagi keilmuan PLS diharapkan hasil informasi dari keberdayaan ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam kaitannya dengan keberdayaan masyarakat. Serta untuk peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor keberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Isjoni.2006. Membangun visi bersama: aspek - aspek penting dalam reformasi pendidikan. Jakarta: yayasan obor indonesia

Lutfiansyah, D.Y dan Hufad, A. 2017. Prosiding Seminar Nasional 4 & Lokakarya PLS FIP UNG: Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) Dalam Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press

Maeswara. G. 2009. Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono. Yogyakarta: Penerbit Narasi

Mimbar. L. 2015. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat. Jurnal Transformasi 10 P2M IAIN Mataram. Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2015. (Online) portalgaruda.org/article. di akses pada tanggal 4 november 2016

Najiyati, S., Asmana, A & Suryadiputra, I.N.N. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International.

Soetomo. 2012. Pembangunan Masyarakat : Merangkai Sebuah Kerangka. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Wrihatnolo, R.R & Dwidjowijoto, R.N. 2007. manajemen pemberdayaan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo